PELAKSANAAN KEGIATAN MENGHIMPUN DANA OLEH UNIT SIMPAN PINJAM SWAMITRA KOPERASI SAIL JAYA TERHADAP CALON ANGGOTA KOPERASI

Oleh : Dina Faurine Br. Sipayung
Pembimbing I : DrFirdaus, SH., MH.
Pembimbing II : Dasrol, SH., MH.
Alamat: Jalan S. Parman Nomor 45, Pekanbaru
Email : dfairnesipayung@gmail.com / Telepon : 082285892313

ABSTRACT

Cooperatives are built to create businesses and services in creating family principles, cooperative businesses are businesses that are compatible with economic democracy, because in economic democracy there are elements of cooperative business. However, a number of cooperatives were indentified as practicing raising funds or receiving savings from the winder community. Savings and Loans Cooperatives specifically in their business activities receive savings (rasing funds) and channeling them, originating from and for their members or other cooperatives and/or their members. The cooperative uses the presence of prospective members who save their moner in the cooperative. By registering propective members as stipulated in applicable regulations. The purpose of this thesis is : first, to find out the implementation of fundraising activities for prospective cooperative members by the Sail Jaya Cooperative Swamitra Savings and Loan Unit. Second, the understanding of prospective members about cooperatives and businesses as well as the rights and obligations of prospective members. Third, to find out the responsibilities of the Sail Jaya Cooperative Swamitra Savings and Loans Unit for raising funds for prospective cooperative members

This thesis research method uses the type of sociological legal research, research conducted by carrying out legal identification and how the effectiveness of the law applies in society. This research is descriptive. Source of data used are primary data and secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, data collection techniques in this study by interview method, and literature review, after the data collected is then analyzed of conclusions.

From the results of the research and discussion it can be concluded first that, the implementation of fundraising activities of prospective cooperative members by the Sail Jaya Cooperative Swamitra Savings and Loan Unit did not work as it should or did not comply with applicable regulations So that the need for legal responsibility given by the cooperative so that prospective members get legal certainty and get their rights and there is a strict action from the government of the City of Pekanbaru Cooperative Service.

Keywords: raise funds – Prospective Member – Savings and Loan (USP) - Cooperatives

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan badan hukum koperasi erat sekali kaitannya dengan sistem perekonomian yang berada di Indonesia. Yang mana pada saat ini setiap individu diupayakan untuk mempunyai usaha sendiri karena tuntutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari lebih berkembang. Untuk itu perlu didirikannya koperasi bertujuan membantu calon pengusaha-pengusaha kecil agar dapat menjalankan kegiatan usahanya demi tercapainya tujuan kesejahteraan rakyat. Secara etimologi koperasi berasal dari kata yang dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* yang merupakan gabungan dua kata, *co* dan *operation*.¹ Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie* yang mempunyai arti kerjasama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela.

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan azas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena didalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi.²

Banyak jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya seperti, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Menurut peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan

kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.³

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam perkembangannya saat ini terhadap kegiatan menghimpun dana tidak hanya menghimpun dana dari anggota koperasi, tetapi juga dilakukan bagi calon anggota yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berkenaan dengan fenomena ini bila dilakukan tidak sesuai peraturan maka koperasi sama dengan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Melihat kenyataan yang ada saat ini kita diberi sebuah pandangan yang sangat merisaukan atas keberadaan koperasi di mana-mana muncul lembaga yang mengatas namakan koperasi akan tetapi jauh dari azas yang digunakan koperasi, bukan lagi ekonomi gotong royong akan tetapi koperasi tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lain yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan meninggalkan prinsip, budaya dan azas koperasi terutama pada jenis koperasi Simpan Pinjam. Inilah dampak perdagangan bebas yang diagungkan dan globalisasi yang melanda negeri ini menimbulkan bergesernya nilai-nilai budaya, prinsip dan tujuan koperasi.⁴

Banyaknya koperasi yang melakukan kegiatan menghimpun dana atau menerima tabungan dari masyarakat yang hanya sebagai calon anggota tanpa menjadikan calon anggota tersebut menjadi anggota koperasi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Namun banyak kenyataan yang terjadi bahwa koperasi tidak mengindahkan peraturan tersebut.

¹ Andjar Pacht W. Dkk, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi Pendirian, dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 15.

² Ulin Ni'mah, *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi BMT Bina Usaha Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 3.

³ Dedeh Dri Sudaryanti dan Nana Sahroni, *Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, dan Total Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha*, Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 1, Nomor 2, Hlm. 156.

⁴ Ikhsan Rochmadi, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi*, STIE Widya Dharma, Jurnal Ekonomi, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm. 46.

USP Swamitra merupakan salah satu Unit Simpan Pinjam Koperasi yang terbentuk dari salah satu kerjasama/kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi, dengan tujuan untuk mengembangkan dan memodernisasi usaha simpan pinjam (USP) melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan system manajemen yang professional, sehingga memiliki kemampuan pelayanan jasa yang lebih baik dan luas. Oleh sebab itu, pengelolaan dari kegiatan usaha unit simpan pinjam dikelola oleh Bank Bukopin. Bahkan mengenai bagaimana prosedur koperasi menghimpun dana atau bagaimana prosedur menabung dan/atau bagaimana prosedur meminjam di Koperasi Sail Jaya melalui prosedur dari Bank Bukopin.⁵

USP Swamitra juga tidak menjadikan calon anggota menjadi anggota koperasi sebagaimana di dalam peraturan bahwa calon anggota koperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus sebagai anggota. pihak koperasi mengatakan bahwa calon anggota untuk menjadi anggota itu bersifat sukarela. Bila tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh koperasi untuk menjadikan calon anggota menjadi anggota maka calon anggota tersebut akan terus-menerus berstatus calon anggota. Dimana bila dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, adanya perbedaan antara anggota koperasi dengan calon anggota koperasi, salah satunya dalam hal koperasi memberikan pelayanan pinjaman yaitu mengumumkan pelayanan kepada anggota koperasi.

Koperasi memanfaatkan keberadaan calon anggota yang menyimpan uangnya di koperasi tersebut. Koperasi mendaftarkan calon anggota tanpa adanya pelunasan simpanan pokok dan tidak melakukan upaya untuk menjadikan calon anggota untuk menjadi anggota koperasi, walaupun calon anggota tersebut sudah menjadi calon anggota lebih dari 3 bulan, dan seharusnya sudah menjadi anggota koperasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang diatas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang Perlindungan calon

anggota koperasi di Indonesia. Untuk itu, penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat, yang hasilnya dituangkan dalam tulisan ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN KEGIATAN MENGHIMPUN DANA OLEH UNIT SIMPAN PINJAM SWAMITRA KOPERASI SAIL JAYA TERHADAP CALON ANGGOTA KOPERASI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas maka merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan menghimpun dana bagi calon anggota koperasi oleh Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Sail Jaya?
2. Apakah calon anggota paham tentang koperasi dan usaha-usaha dari koperasi termasuk mengenai hak dan kewajiban dari calon anggota?
3. Bagaimanakah tanggung jawab Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Sail Jaya terhadap kegiatan menghimpun dana bagi calon anggota koperasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan lebih rinci, tujuan peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan menghimpun dana bagi calon anggota koperasi oleh Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Sail Jaya.
- b. Untuk mengetahui calon anggota paham tentang koperasi dan usaha-usaha dari koperasi termasuk mengenai hak dan kewajiban dari calon anggota.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Sail Jaya terhadap kegiatan menghimpun dana bagi calon anggota koperasi

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik yang secara teoritis maupun praktis :

a. Manfaat Teoritis

- 1.) Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu

⁵ Hasil wawancara dengan Atniwatti. AZ, Manager USP Swamitra Koperasi Sail Jaya pada tanggal 28 Oktober 2019.

(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

- 2.) Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi calon anggota terhadap kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh USP Koperasi Sail Jaya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, koperasi, masyarakat umum, dan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum bagi calon anggota terhadap kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh USP Koperasi Sail Jaya..

D. Kerangka Teori

1. Teori Good Corporate Governance

Pelaksanaan Good Corporate Governance tidak terlepas dari berbicara dengan perubahan yang memiliki badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Meijers, menyatakan badan hukum itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban begitu juga pendapat Loemann dan E. Utrecht.⁶

Good Corporate Governance semakin.

Sebagai suatu konsep yang populer di kalangan pebisnis dan pelaku ekonomi, Good Corporate Governance belum mempunyai definisi atau pengertian tunggal. Tetapi terdapat gambaran mengenai definisi Good Corporate Governance, yaitu sebagai berikut:

Definisi menurut Organization For Economic Cooperation (OECD):⁷

Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different

participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and othe shareholders, and spells out rulers and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.

Sesuai dengan pengertian di atas, berdasarkan OECD, Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan kegiatan suatu bisnis Perusahaan. Corporate Governance mengatur pembagian tugas, hak serta kewajiban bagi mereka yang memiliki kepentingan terhadap kehidupan dari organ Perusahaan, termasuk para pemegang saham, Dewan Pengurus, Para Manager, dan juga semua anggota stakeholders non pemegang saham. Corporate Governance juga menerapkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan oleh Dewa Pengurus dan juga Direksi mengenai pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan Perusahaan.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional adalah koperasi yang berfungsi sebagai pilar yang tegak dan kokoh menyangga perekonomian nasional bersama pilar lainnya yaitu BUMN dan BUMS. Koperasi ditempatkan sebagai lembaga, sebagai mekanisme/proses, dan sebagai sistem nilai. Berdasarkan data Kementrian KUKM kondisi perkoperasian menghadapi permasalahan dalam memperlihatkan keberlangsungan hidupnya Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajer koperasi, pengurus koperasi, pengawas, para pemilik modal dan para stakeholders lainnya. Good Corporate Governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi suatu penentuan sasaran-sasaran dari suatu koperasi dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kerja.⁸

⁶ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni Bandung, 2005, hal. 18.

⁷ Imam Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Coporate Governance (GCG)*, Harvarindo, Jakarta, 2002, hal 1-2

⁸ Rima Elya Dasuki, *Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*, Jurnal Frima-2018, Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Stiombi, hal 739-749

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan pada koperasi penting dilakukan agar dalam pengelolaan koperasi dapat merubah sistem organisasi, dengan tujuan adalah menciptakan kinerja, pengendalian internal yang baik dan mengurangi kelemahan tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel serta memiliki hubungan yang baik bagi stakeholder serta shareholder dan didukung dengan sistem informasi yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi lebih bermanfaat dan efisien.⁹

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen, yang menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.¹⁰

Subjek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggungjawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).¹¹ Konsep modern tentang tanggung jawab keperdataan (*civil liability*) secara umum menyatakan bahwa unsur kesalahan pada seseorang yang menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain merupakan syarat mutlak

bagi adanya perbuatan melawan hukum. Teori bahwa tiada tanggung jawab tanpa kesalahan (*no liability without fault*) menjadi dogma yang berlaku umum. Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap telah ada, jika dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai diri korban tersebut.¹²

KUHPerdata Indonesia mengatur mengenai prinsip tanggung jawab ini berkaitan dengan masalah penyelesaian ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.¹³ Pasal ini terkenal dengan pasal mengenai tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan (*based on fault liability*), atau biasa disebut pasal perbuatan melawan hukum dengan beban pembuktian terletak pada korban sebagai penggugat. Hal ini sejalan dengan pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan¹⁴: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Koperasi dalam hal ini harus melakukan pendaftaran calon anggota untuk menjadi anggota koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan dijadikannya calon anggota menjadi anggota dari koperasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum terhadap pemenuhan hak sebagai anggota koperasi. Dan apabila koperasi tidak mengangkat anggota koperasi sesuai dengan peraturan

⁹ Martinus Sony Erstiawan dan Tony Soebijono, Analisis *Good Corporate Governance Pada Koperasi (Pendekatan Sistem Informasi Studi Kasus Koperasi Setis Bakti Wanita di Surabaya)*, eJurnal Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, hal. 2.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta: 2012, hlm. 56.

¹¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Ibid*, hlm.

¹² Ahmad Sudiro, Konsep Keadilan Dan System Tanggung Jawab Keperdataan Dalam Hukum Udara, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol.19 Juli 2012, hlm. 447.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook)*, Pradnya Paramitra, Jakarta: 1992, hlm. 346.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 475.

yang berlaku dan melakukan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Calon Anggota adalah orang perorang/koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota.¹⁵
2. Menghimpun dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya¹⁶
3. Unit Simpan Pinjam (USP) adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.¹⁷
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada apa yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Maksud penelitian yuridis sosiologis atau empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹⁹

Penelitian hukum sosiologis pada dasarnya merupakan suatu penelitian tentang

hukum yang bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan tentang pertentangan antara *law in books* dan *law in actions*. *Law in books* adalah hukum yang dipelajari atau hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dalam suatu bentuk perundang-undangan, sedangkan *law in action* adalah pelaksanaan dari *law in books* dalam kehidupan masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, USP Koperasi Sail Jaya. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa antara lain karena USP Koperasi Sail Jaya yang merupakan salah satu dari koperasi yang bermitra dengan Bank Bukopin yang menerima masyarakat sebagai calon anggota koperasi namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himbuan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²¹ Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Seksi Perizinan dan Legalitas Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, Seksi Operator Online Data Sistem Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, Manager USP Swamitra Koperasi Sail Jaya.

b. Sampel

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²² Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik propulsive sampling,

¹⁵ Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

¹⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 7.

¹⁷ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 30.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 142.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2011, hlm. 118.

²² *Ibid*

yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti, tidak semua populasi yang dijadikan sebagai sampel :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi
1.	Seksi Perizinan dan Legalitas Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru	1
2.	Seksi Operator Online Data Sistem Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru	1
3.	Manager USP Swamitra Koperasi Sail Jaya	1
4.	Calon Anggota Koperasi	4

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2019

4. Sumber Data

a. Bahan hukum primer,

Data Bahan hukum primer penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Peraturan dan Undang-undang antara lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

b. Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder penelitian ini yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan hukum tertier,

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat diperoleh dari ensiklopedia, Kamus Besar Hukum Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, metode wawancara dapat

pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Sementara itu, wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan. Dengan demikian si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode penelitian ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang ditanyakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kualitatif menggunakan data yang diperoleh dengan kalimat serta penajaman pada logika sehingga dapat dimengerti semua pihak. Setelah semua data berhasil dikumpul, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang terang dan rinci. Selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada haal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris

dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²³

Pengertian Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.²⁴

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Perkoperasian,²⁵ yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang di dalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama, Pasal (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan telah berurat-berakar dalam jiwa bangsa Indonesia.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Good Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholders value) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders), seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas.²⁷

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik memberikan perlindungan yang

memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal. Ada lima macam tujuan utama (GCG) yaitu:

- a. melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b. melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-pemegang saham.
- c. meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan.
- d. meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

Dalam penerapannya untuk melaksanakan GCG dalam suatu perusahaan dibutuhkan prinsip-prinsip sehingga GCG bisa terlaksanakan dengan baik. Menurut (Komite Nasional Kebijakan Governance) KNKG, prinsip-prinsip GCG yaitu :²⁸

- a. Transparansi (Transparency)
- b. Akuntabilitas (Accountability)
- c. Responsibilitas (Responsibility)
- d. Independensi (Independency)
- e. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Mekanisme corporate governance (CG) merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme (CG) diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi.

Adapun manfaat dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada Stakeholders.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada

²³ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 1.

²⁴ Arifin Sitio Dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, PT. Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 17.

²⁵ Undang-Undang Nomor 25 tahun 1995 Tentang Perkoperasian Pasal 3.

²⁶ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 37.

²⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insanai, Jakarta, 2004, hal. 626.

²⁸ Lukas William Andypratama dan Ronny H. Mustamu, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governanca Pada Perusahaan Keluarga : Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan*, Jurnal AGORA Vol. 1, No. 1, Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra, 2013, hal. 3.

akhirnya akan meningkatkan corporate value.

- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden.²⁹

Penerapan sistem Good Corporate Governance (CGC) yang diterapkan pada koperasi penting dilakukan agar dalam pengelolaan koperasi dapat merubah sistem organisasi, dengan tujuan adalah menciptakan kinerja, pengendalian internal yang baik dan mengurangi kelemahan tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel serta memiliki hubungan yang baik bagi *stakeholders* serta *shareholder* dan didukung dengan sistem informasi yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi lebih bermanfaat dan efisien.

Pengelolaan manajemen koperasi didasarkan pada aturan yang berlaku diantaranya AD/ART, kebijakan, struktur organisasi, peran, dan aturan yang memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan jobdesk dari para pengurus, pengawas, dan pengelola dilakukan secara sistematis dalam menjalankan koperasi yang berlandaskan visi dan misi serta tata kelola (Good Corporate Governance) koperasi yang transparan, mandiri, memiliki akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Sesuai kurangnya perhatian sistem informasi dalam pengembangan diri koperasi untuk mempermudah informasi dan mempermudah pengelolaan koperasi sehingga pengambilan keputusan lebih cepat.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³¹

Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut : “Tiap perbuatan

melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³²

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu³³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*)
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*),
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*)

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

PT USP Swamitra Pekanbaru pada awalnya hanya beranggotakan karyawan Bank Bukopin, itulah sebabnya koperasi ini bernama Koperasi Karyawan Bank Bukopin. Dalam perkembangannya, koperasi tidak hanya menerima anggota yang merupakan karyawan Bukopin saja, tetapi juga menerima masyarakat yang berada di sekitarnya sebagai anggota walaupun bukan merupakan karyawan Bukopin. Koperasi ini bergerak dalam bidang simpan pinjam atau Unit Simpan Pinjam (USP) yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan usaha simpan pinjam dikalangan anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, untuk membuka akses permodalan bagi anggota koperasi yang selama ini banyak menghadapi kendala dalam kerjasama dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya. Anggota-anggota koperasi menyetujui isi Anggaran Dasar,

²⁹ M. Wahyudin Zarkashi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 25.

³⁰ Martinus Sony dan Erstiawan dan Tony Soebijono, *Ibid.*, hal. 2.

³¹ *Ibid.*, hlm. 81

³² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT Raja Grafindo Persada Bandung, 2006, hlm. 49

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*

Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuag koperasi yang berlaku, serta diwajibkan membayar simpanan wajib dan simpanan pokok.³⁴

BAB IV **HASIL PENELITIAN DAN** **PEMBAHASAN**

1. Pelaksanaan Kegiatan Menghimpun Dana Bagi Calon Anggota Koperasi Oleh Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Sail Jaya

Secara umum koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.³⁵

Unit Simpan Swamitra Koperasi Sail Jaya merupakan koperasi simpan pinjam. USP Swamitra Koperasi Sail Jaya merupakan salah satu Unit Simpan Pinjam Koperasi yang terbentuk dari salah satu kerjasama/kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi. Dan kegiatan dari USP Swamitra Koperasi Sail Jaya dikelola oleh Bank Bukopin, artinya dalam hal manajemen, suku bunga, menyimpan dana (menabung), meminjamkan, dan prosedurnya ditentukan oleh Bank Bukopin. Sehingga dalam kegiatan yang dilakukan oleh USP Swamitra ini diadopsi dari Bank Bukopin.³⁶

Berdasarkan wawancara dengan Manager USP Swamitra mereka menyatakan bahwa mereka melayani simpan atau menabung dan meminjam selain anggota dan/atau calon anggota sebagaimana dengan peraturan yang berlaku. Prosedur dalam kegiatan menghimpun dana bagi calon anggota USP Swamitra yaitu harus melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir dengan menyetorkan uang sebesar Rp.5.000,- sebagai calon anggota koperasi, dan membuka buku tabungan dengan minimal

simpanan Rp.50.000,- kemudian dapat menyimpan dana atau menabung.³⁷ Namun bila dilihat dari prosedur untuk menjadi calon anggota di Koperasi Sail Jaya adalah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 18, dimana masyarakat untuk menjadi calon anggota hanya mendaftar dengan biaya Rp.5.000,- dan harus membuka buku tabungan dengan minimal saldo Rp.50.000,- tanpa adanya pembayaran untuk melunasi simpanan pokok. Hal ini juga dibenarkan oleh Seksi Perizinan dan Legalitas Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru bahwa pihak USP Swamitra dalam merekrut masyarakat untuk menjadi anggota dan/atau calon anggota adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) dimana yang dimaksud calon anggota adalah orang perorang/koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota. Oleh sebab itu, Kepala Operator Online Data Sistem Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru mengatakan hal ini sama dengan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat karena koperasi tersebut menerima calon anggota tanpa memenuhi seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tersebut yaitu melakukan pelunasan pembayaran simpanan pokok.³⁹

Dalam melaksanakan kegiatan usaha di koperasi simpan pinjam, dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Pengertian calon anggota koperasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 18 Ayat (2),

³⁷ Hasil wawancara dengan, Atniwati. AZ, Manager USP Swamitra Koperasi Sail Jaya, pada tanggal 28 Oktober 2019.

³⁸ Hasil wawancara dengan Seksi Perizinan dan Legalitas Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, pada tanggal 18 Oktober 2019.

³⁹ Hasil wawancara dengan Seksi Operator Online Data Sistem Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, Hari Senin, pada tanggal 18 Oktober 2019, bertempat di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

³⁴ Hasil wawancara dengan, Atniwati. AZ, Manager USP Swamitra Koperasi Sail Jaya, pada tanggal 28 Oktober 2019.

³⁵ Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), hlm. 9.

³⁶ *Ibid*

Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Oleh karena itu, yang dapat disebut dengan calon anggota koperasi adalah yang sudah mendaftarkan dan setelah melunasi simpanan pokok yang sudah ditentukan oleh koperasi, bila belum melunasi simpanan pokok, maka belum dapat disebut sebagai calon anggota suatu koperasi.

Yang dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat adalah badan hukum perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

USP Swamitra Koperasi Sail Jaya juga tidak menjadikan calon anggota menjadi anggota koperasi sebagaimana di dalam peraturan bahwa calon anggota koperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus sebagai anggota. pihak koperasi mengatakan bahwa calon anggota untuk menjadi anggota itu bersifat sukarela. Bila tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh koperasi untuk menjadikan calon anggota menjadi anggota maka calon anggota tersebut akan terus-menerus berstatus calon anggota.

Dengan tidak dilakukannya cara pendaftar calon anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku maka hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagaimana kedudukan baik dalam hak yang akan diperoleh oleh para calon anggota yang semestinya sudah dapat dijadikan anggota koperasi. Selain tidak adanya kepastian hukum bagi calon anggota, hak daripada calon anggota untuk menjadi anggota tetap dari USP Swamitra tidak terpenuhi, salah satu hak yang tidak dapat dimiliki adalah hak suara pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 19 Ayat 20 mengatur mengenai hak-hak

daripada anggota koperasi. Dan hal inilah yang ingin Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru agar pihak dari USP Swamitra dapat mendaftarkan semua calon anggota menjadi anggota koperasi agar terpenuhi hak-haknya, dan kegiatan dari USP Swamitra berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maka dari itu, apabila koperasi dalam hal melakukan kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan kepada calon anggota koperasi tetapi calon anggota tersebut belum melunasi simpanan pokok tetapi sudah disebut sebagai calon anggota koperasi, maka koperasi tersebut menghimpun dana dari non anggota atau masyarakat pada umumnya.⁴⁰ Seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan kegiatan koperasi simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. USP Swamitra seharusnya melaksanakan kegiatan daripada koperasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga koperasi dapat dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat.

2. Pemahaman Calon Anggota Tentang USP Swamitra, Kegiatan Usaha Dari Koperasi, Dan Mengenai Hak dan Kewajiban

Kegiatan usaha dari USP Swamitra Sail Jaya adalah merupakan unit koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam. Dan kegiatan usaha ini bermitra dengan Bank Bukopin. Berdasarkan wawancara dengan Manager USP Swamitra Koperasi Sail Jaya melayani masyarakat yaitu anggota koperasi aktif, pasif, dan calon anggotan yaitu seperti :⁴¹

- Simpanan
- Simpanan Berjangka
- Pinjaman

Berdasarkan wawancara dengan Manager USP Swamitra mengenai hak dan kewajiban calon anggota tidak ada dimuat dalam anggaran dasar daripada USP Swamitra, tetapi hampir

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Seksi Operator Online Data Sistem Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, pada tanggal 18 Oktober 2019.

⁴¹ Hasil wawancara dengan, Atniwatti. AZ, Manager USP Swamitra Koperasi Sail Jaya, pada tanggal 28 Oktober 2019.

sama dengan hak dan kewajiban dari anggota koperasi, hanya saja perbedaannya adalah calon anggota USP Swamitra tidak memiliki hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).⁴²

Sehubungan pemahaman calon anggota tentang USP Swamitra, kegiatan usaha, serta hak dan kewajiban. Maka dengan ini penulis mengambil 4 orang responden yang berstatus sebagai calon anggota

Tabel IV. 1
Responden yang Mendaftar sebagai Calon Anggota

Pernyataan	Jawaban	sentase (%)
Paham	0	0%
Tidak Paham	4	100%

Sumber Data : Data Olahan Lapangan 2020

Dari tabel diatas, dengan 4 responden/calon anggota, masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota USP Swamitra dapat disimpulkan bahwa calon anggota tidak paham dengan bagaimana USP Swamitra itu sendiri, hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada tranparansi daripada pihak USP Swamitra dalam memberikan keterangan dan informasi tentang USP Swamitra sendiri.

Anggaran Dasar tidak ada dimuat mengenai hak dan kewajiban daripada calon anggota. Seharusnya dalam pengelolaan manajemen koperasi didasarkan pada aturan yang berlaku diantaranya Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dilakukan secara tersistem dalam menjalankan koperasi yang berlandaskan visi dan misi serta tata kelola (Good Corporate Governance) koperasi yang transparan, mandiri, memiliki akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

3. Tanggung Jawab Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Sai Jaya Terhadap Kegiatan Menghimpun Dana Bagi Calon Anggota Koperasi

a. Tanggung Jawab Unit Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Koperasi sebagai organisasi memiliki alat perlengkapan yang terdiri rapat anggota, pengurus dan pengawas dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi karena rapat anggota dapat dikategorikan sebagai kumpulan dari pemilik koperasi, yaitu anggota yang telah menyetorkan simpanan (pokok dan wajib) sebagai modal koperasi. Dalam menjalankan usaha koperasi, rapat anggota menunjuk pengurus yang diberi wewenang untuk mengurus koperai. Pengurus dipilih anggota dan oleh rapat anggota, sehingga masing-masing anggota mempunyai kesempatan yang sama menjadi pengurus.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur, bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, oleh sebab itu pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Tugas pengurus Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 meliputi :

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. Mengajukan laboran keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

b. Tanggung Jawab Unit Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Pasal 19 Ayat (1) : Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:

- 1.) menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- 2.) memberikan pinjaman kepada anggota,

⁴² Hasil wawancara dengan, Atniwatti. AZ, Manager USP Swamitra Koperasi Sail Jaya, pada tanggal 28 Oktober 2019.

calon anggotanya, lain dan atau anggotanya.

Dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam Pasal 18 menyatakan bahwa :

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Pada kasus yang peneliti teliti, dapat dilihat bahwa USP Swamitra Koperasi Sail Jaya tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam hal menghimpun dana terhadap calon anggota koperasi. Disini USP Swamitra yang hanya menjadikan calon anggota tanpa harus melunasi simpanan pokok terlebih dahulu, sehingga USP Swamitra menghimpun dana bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini masyarakat yang berstatus sebagai calon anggota harus dapat meminta pertanggung jawaban hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pihak USP Swamitra Koperasi Sail Jaya yaitu mengangkat masyarakat menjadi calon anggota sebagaimana yang berlaku menurut peraturan agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, termasuk untuk tidak dana mereka yang dihimpun. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori yang penulis tulis yaitu Tanggung Jawab Hukum, Tanggung Jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴³ Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.⁴⁴

Berdasarkan wawancara Manager USP Swamitra bahwa untuk menjadikan calon

anggota untuk menjadi anggota hanya dengan memberikan pemberitahuan bahwa jika ingin menjadi anggota tetap boleh, jika tidak juga tidak apa-apa, dalam artian tidak adanya ketegasan atau paksaan.⁴⁵ Sehingga calon anggota tersebut akan terus berstatus calon anggota. Tidak ada upaya memberikan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak USP Swamitra mengenai bagaimana pelaksanaan menghimpun dana bagi calon anggota.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi Kota Pekanbaru dalam upaya USP Swamitra agar melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Seksi Perizinan dan Legalitas Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru adalah dengan memanggil dan memberi peringatan kepada pihak daripada USP Swamitra untuk dapat menjadikan para calon anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan melunasi simpanan pokok terlebih dahulu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Namun sampai saat ini pihak dari USP Swamitra belum juga mengindahkan peringatan yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. USP Swamitra tetap melakukan kegiatan yang sebagaimana berlaku di USP tersebut. Hal tersebut dilakukan pihak Dinas Koperasi Kota Pekanbaru adalah untuk menjaga agar hak daripada calon anggota koperasi terpenuhi, salah satunya adalah untuk menjadi anggota koperasi tersebut. Dan supaya pihak USP Swamitra tidak melakukan kegiatan menghimpun dana terus-menerus daripada calon anggota koperasi. Pihak Dinas Koperasi Kota Pekanbaru meminta kepada pihak USP Swamitra untuk dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

⁴³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005:

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 55.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan, Atniwatti. AZ, Manager USP Swamitra Koperasi Sail Jaya, pada tanggal 28 Oktober 2019.

⁴⁶ *Ibid.*

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan menghimpun dana bagi calon anggota koperasi oleh Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Sail Jaya tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga karena tindakan demikian adanya hak daripada calon koperasi yang tidak dapat terpenuhi. Pihak USP Swamitra tidak melaksanakan kewajibannya untuk dapat menjadikan masyarakat yang mendaftar menjadi calon anggota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 18. Dan dalam peraturan tersebut setelah melunasi simpanan pokok harus dijadikan sebagai anggota koperasi. Oleh sebab itu, dengan tidak didaftarkan calon anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku menyebabkan tata kelola daripada koperasi tidak berjalan dengan baik.
2. Pemahaman calon anggota terhadap USP Swamitra, kegiatan, serta hak dan tanggung jawab masih dapat dikatakan tidak paham, calon anggota hanya mengetahui cara simpan pinjam saja. Dan dari pihak USP Swamitra tidak memberikan informasi yang dapat mudah dipahami oleh masyarakat yang mendaftar sebagai calon anggota.
3. Tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pihak USP Swamitra hanya dalam bentuk pemberitahuan bagi para calon anggota tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pihak dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru memberikan langkah yaitu dengan memanggil dan memberi peringatan kepada pihak dari USP Swamitra untuk dapat menjadikan para calon anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan melunasi simpanan pokok terlebih dahulu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Dimana hal ini dilakukan agar hak daripada calon anggota koperasi terpenuhi, salah satunya adalah untuk menjadi anggota koperasi tersebut.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini sesuai dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak USP Swamitra Koperasi Sail Jaya untuk dapat melaksanakan peraturan yang berlaku dalam hal kegiatan menghimpun dana dengan mendaftarkan masyarakat untuk menjadi calon anggota. Sehingga adanya tata kelola dari USP tersebut berjalan dengan baik. Calon anggota juga harus aktif dalam mengetahui prosedur-prosedur atau cara mendaftarkan diri sebagai calon anggota, sehingga hak-haknya bisa dipenuhi, agar terhindar daripada kesengajaan atau kelalaian dari pihak USP.
2. Pihak USP Swamitra seharusnya dapat memberikan informasi-informasi yang jelas kepada masyarakat yang hendak menjadi calon anggota terutama hak dan kewajibannya, dan harus dimuat jelas pada Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
3. Pihak USP seharusnya memberikan pertanggung jawaban hukum bagi calon anggota yang menghimpun dana dengan melaksanakan atau mengikuti peraturan yang berlaku. Dan pihak pemerintah yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru untuk dapat tegas dalam memberikan peringatan bagi USP yang melakukan hal menghimpunan dana yang dilakukan bagi para calon anggota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Chaidir, 2005, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2012, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja, 2011, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Kalsen, Hans, 2006 *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT Raja Grafindo Persada Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Pachta, W. Andjar Dkk, 2005 *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi Pendirian, dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta.

Pandia, Frianto, 2012, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pramono, Nindyo, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Reksohadiprojo, Sukanto, 1993, *Manajemen Koperasi*, BPFE, Yogyakarta.

Sitio, Arifin Dan Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktik*, PT. Erlangga, Jakarta.

Sjahputra, Imam dan Amin Widjaja Tunggal, 2002, *Membangun Good Coporate Governance (GCG)*, Harvarindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook)*, Pradnya Paramitra, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011 *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insanai, Jakarta.

Zarkashi, M. Wahyudin, 2008, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

B. Jurnal/ Skripsi/ Kamus

Andypratama, Lukas William dan Ronny H. Mustamu, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governanca Pada Perusahaan Keluarga : Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan*, Jurnal AGORA Vol. 1, No. 1, Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra, 2013

Dasuki, Rima Elya, *Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan*

Pinjam Dan Pembiayaan Syariah, Jurnal Frima-2018, Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Stiambi.

Erstiawan, Martinus Sony dan Tony Soebijono, *Analisis Good Corporate Governance Pada Koperasi (Pendekatan Sistem Informasi Studi Kasus Koperasi Setis Bakti Wanita di Surabaya)*, eJurnal Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.

Ni'mah, Ulin, *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi BMT Bina Usaha Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2011.

Rochmadi, Ikhsan, *Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergeserna Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi*, STIE Widya Dharma, Jurnal Ekonomi, Vol. 4, No. 2, 2011.

Sudaryanti, Dedeh Dri dan Nana Sahroni, *Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, dan Total Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha*, Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 1, Nomor 2.

Sudiro, Ahmad, *Konsep Keadilan Dan System Tanggung Jawab Keperdataan Dalam Hukum Udara*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol.19 Juli 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 10 Taun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1997
Tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.